

**PENDAMPINGAN BERBASIS MODAL SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN PADA ORGANISASI KPPI (KESATUAN  
PEREMPUAN PESISIR INDONESIA) DI BAGAN DELI KECAMATAN  
MEDAN BELAWAN**

Bengkel Ginting<sup>1</sup>, Muryanto Amin<sup>2</sup>, Tonny Pangihutan Situmorang<sup>3</sup>, Alwi Dahlan Ritonga<sup>4</sup>

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara<sup>1</sup>

Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara<sup>2-4</sup>

Email: [bengkel@usu.ac.id](mailto:bengkel@usu.ac.id)<sup>1</sup>, [muryantoomin@usu.ac.id](mailto:muryantoomin@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [tonnysitumorang@usu.ac.id](mailto:tonnysitumorang@usu.ac.id)<sup>3</sup>,  
[alwidahlanritonga@usu.ac.id](mailto:alwidahlanritonga@usu.ac.id)<sup>4</sup>

Keywords	Abstract
<i>Social Capital, Welfare, Fishermen</i>	<p><i>Community service activities are one of the obligations that must be carried out by every lecturer in Higher Education. The proposed Community Service Activity is entitled: Social Capital-Based Mentoring to Improve Women's Welfare in the Kppi Organization (Indonesian Coastal Women's Union) in Bagan Deli, Medan Belawan District. Mentoring based on strengthening social capital for female fishers in the Indonesian Coastal Women's Union (KPPI) Medan organization is an empowerment strategy that aims to improve their welfare through the utilization of social networks, trust, and community norms. This program not only focuses on increasing individual capacity, but also strengthening social relationships that can open access to economic opportunities, resources, and social protection. By strengthening social capital, female fishers in the Indonesian Coastal Women's Union (KPPI) Medan organization can more easily share information, obtain support in facing challenges, and increase their competitiveness. In addition, this activity also encourages the active participation of female fishers in decision-making in the community, increases awareness of their rights, and strengthens solidarity and collaboration among group members. With the assistance provided, it is hoped that female fishermen will not only experience increased economic welfare, but also gain greater recognition in the fisheries sector and in their social life as a whole.</i></p>
<i>Modal Sosial, Kesejahteraan, Nelayan</i>	<p><i>Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen di Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian yang diusulkan berjudul: Pendampingan Berbasis Modal Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Pada Organisasi Kppi (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) Di Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Pendampingan berbasis penguatan modal sosial kepada nelayan perempuan pada organisasi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Medan merupakan strategi pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma komunitas. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang dapat membuka akses terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan</i></p>

*perlindungan sosial. Dengan memperkuat modal sosial, nelayan perempuan pada organisasi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Medan dapat lebih mudah berbagi informasi, memperoleh dukungan dalam menghadapi tantangan, serta meningkatkan daya saing mereka. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif nelayan perempuan dalam pengambilan keputusan di komunitas, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, serta memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar anggota kelompok. Dengan adanya pendampingan yang dilaksanakan, diharapkan nelayan perempuan tidak hanya mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendapatkan pengakuan yang lebih besar dalam sektor perikanan serta dalam kehidupan sosial mereka secara keseluruhan.*

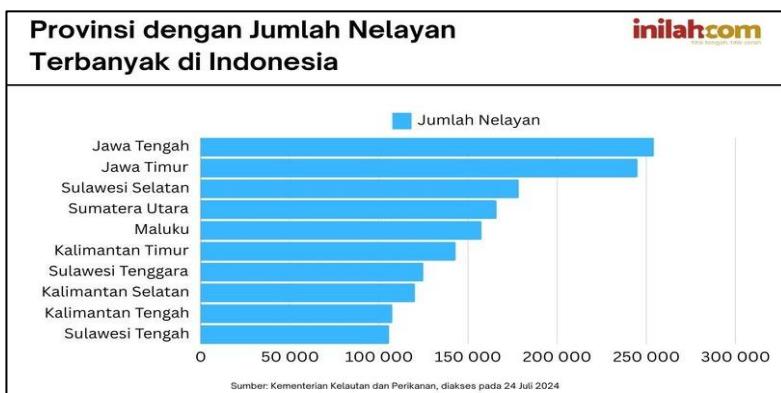
---

## **1. PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan luas laut yang mencapai sekitar 3,25 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Pada daerah pesisir, laut menjadi kegiatan yang diwariskan dari generasi ke generasi(1). Masyarakat yang tinggal di pesisir memiliki keterampilan dalam menangkap ikan dan juga mengolah hasil laut hingga memperdagangkannya dipasar. Hal tersebut menjadikan profesi nelayan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat pada daerah pesisir, sehingga banyak orang yang memilih untuk menjadikan profesi tersebut sebagai mata pencaharian utama. Menurut Nontji (2002) salah satu faktor yang menjadi pendorong utama banyaknya nelayan di Indonesia ialah faktor ekonomi dikarenakan sektor perikanan menawarkan peluang ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat pesisir, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian atau akses ke sektor industri(2). Dengan peralatan sederhana, nelayan sudah bisa menangkap ikan dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Gambar 1. Data 10 Provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak**



Sumber: Inilah.com(3)

Berdasarkan data yang di paparkan oleh Kementerian Kelautan pada tahun 2024 yang dikutip dari artikel Inilah.com (2024), Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi terbanyak ke-empat (4) dengan jumlah nelayan yang mencapai angak 160.000 orang(3).

Di berbagai wilayah pesisir, banyak perempuan yang memilih profesi sebagai nelayan. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan juga pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, dalam perkembangannya, peran perempuan dalam profesi ini sering kali dianggap tidak cocok bagi perempuan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh nelayan perempuan adalah stigma sosial yang menganggap bahwa melaut dan menangkap ikan adalah pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh laki-laki. Pandangan ini berasal dari budaya patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat pesisir, dimana perempuan lebih diharapkan untuk mengurus rumah tangga daripada bekerja dilaut. Padahal, di berbagai daerah pesisir, perempuan juga memiliki kontribusi yang dalam aktivitas perikanan, baik dalam proses penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran produk perikanan.

Pada awal tahun 2008 tepatnya di Yogyakarta diadakan lah pertemuan yang dihadiri oleh pejuang nelayan dari sejumlah organisasi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Komite Pembentukan Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI). Suatu panitia atau komite yang bekerja untuk mempersiapkan kelahiran organisasi nelayan tradisional yang bersifat nasional. KPNNI melaksanakan Kongres Nelayan Tradisional I yang kemudian menyepakati pendirian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada 15 Mei 2009. Lalu, pada musyawarah Nasional Keempat pada 2022 yang berlokasi dua tempat, yaitu Jakarta dan Bogor.

Munas ini semakin meneguhkan KNTI sebagai wadah perjuangan untuk memenuhi hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional Indonesia. Tumbuhnya organisasi ditandai banyaknya peserta yang hadir meliputi 37 perwakilan Dewan Pengurus Daerah dan 4 Pengurus Wilayah. KNTI juga membentuk Badan Otonom KNTI, yaitu, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI)(4).

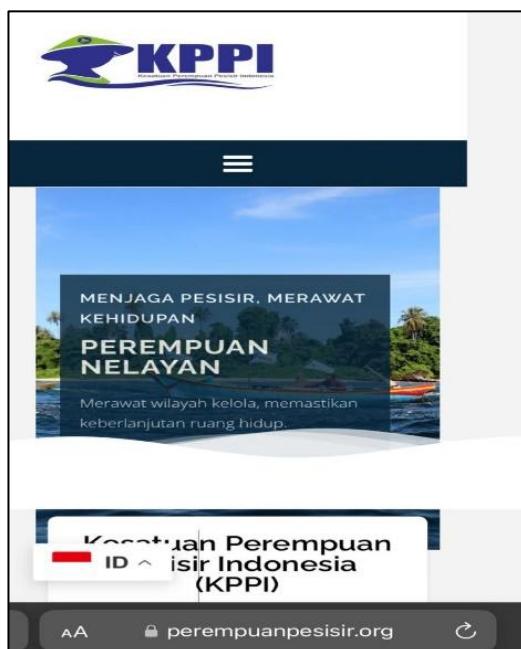
**Gambar 2. Logo KPPI**



KPPI didirikan berlandaskan pada pemikiran bahwa perempuan pesisir Indonesia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan nelayan, selain berfungsi sebagai istri nelayan yang hanya mengatur urusan domestik rumah tangga, perempuan juga memegang peranan penting untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan, bahkan tidak sedikit perempuan yang ikut pergi melaut dan melakukan penangkapan ikan serta mengolah hasil tangkapan nelayan menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan perempuan pesisir indonesia, dengan tujuan, memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan, memperjuangkan keadilan serta menuju kesejahteraan dan kedaulatan perempuan nelayan serta keberlanjutan ruang hidupnya(4).

KPPI terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak, keadilan, dan kesejahteraan perempuan nelayan serta keberlanjutan ruang hidup mereka. Dengan jaringan yang mencakup tingkat nasional hingga provinsi dan kabupaten, KPPI menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus bekerja sama secara setara dalam mengadvokasi kebijakan yang menjamin kesejahteraan perempuan pesisir dan keluarganya. Di tengah stigma patriarki yang mengekang eksistensi perempuan nelayan, kami berjuang untuk mewujudkan keadilan gender dan sosial serta memberdayakan perempuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Gambar 3. Situs resmi KPPI**



Sejak berdiri pada tahun 2022, dengan anggota perempuan yang awalnya hanya berjumlah 50 orang, kini telah berkembang menjadi 824 anggota yang tersebar di 17 DPD (tingkat kabupaten) di 5 provinsi, antara lain NTB, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Peran perempuan nelayan sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan nelayan laki-laki. Nelayan perempuan, khususnya yang berasal dari keluarga miskin, menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kurangnya dukungan kebijakan, hingga faktor sosial dan budaya yang membatasi ruang gerak mereka dalam profesi ini. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan perempuan miskin adalah keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas mereka sehingga kebutuhan hidup mereka menjadi tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, pendampingan berbasis modal sosial menjadi strategi yang efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan pesisir. Modal sosial merupakan konsep yang merujuk pada jaringan sosial, norma, dan nilai yang dapat memfasilitasi kerja sama dalam suatu komunitas maupun individu guna mencapai tujuan bersama. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pendampingan berbasis modal sosial menjadi salah satu strategi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan miskin di daerah pesisir. Nan (2007) mengungkapkan bahwa, modal sosial yang mencakup jaringan sosial, norma, dan

kepercayaan dalam komunitas, dapat menjadi sumber kekuatan bagi perempuan pesisir untuk mengakses sumber daya ekonomi, pelatihan keterampilan, serta peluang usaha yang lebih luas(5). Dalam bukunya, Coleman (2017) menganggap modal sosial sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif(6). Dalam konteks nelayan perempuan, penting untuk membangun kepercayaan dan norma sosial dalam kelompok nelayan perempuan agar mereka dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengelola serta memperjuangkan hak-hak mereka.

**Terdapat beberapa alasan mengapa memilih organisasi ini sebagai sasaran pengabdian yaitu:**

1. KPPI adalah organisasi yang mendorong adanya partisipasi atas akses dan kontrol, pelakasanaan, serta evaluasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan pesisir, sebagai upaya pemenuhan atas hak-haknya sebagai warga negara.
2. KPPI memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan perempuan yang bekerja di sektor perikanan. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi perempuan nelayan untuk saling mendukung, tetapi juga sebagai alat advokasi dan pemberdayaan ekonomi serta sosial
3. KPPI memiliki visi, inisiatif , produktif dan kreatif dalam membangun penguatan ekonomi untuk ketahanan pangan nelayan perempuan yang dilakukan secara kolektif dan menjunjung prinsip persatuan.

Organisasi ini pada dasarnya memiliki peran yang cukup penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggotanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, kurangnya pengakuan sosial, dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendampingan berbasis modal sosial menjadi strategi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas organisasi ini dalam menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.

### **Permasalahan Organisasi**

Nelayan perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga berperan dalam pengolahan, distribusi, serta pemasaran hasil laut. Selain itu, mereka juga memikul tanggung jawab domestik di rumah tangga, menjadikan peran

mereka semakin kompleks dan krusial dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kesejahteraan nelayan perempuan pesisir harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, karena kesejahteraan mereka berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, komunitas, serta keberlanjutan sektor perikanan itu sendiri. Kesejahteraan nelayan perempuan pesisir berhubungan erat dengan stabilitas ekonomi keluarga mereka.

Dalam banyak komunitas di daerah pesisir, pendapatan dari sektor perikanan menjadi sumber utama bagi kehidupan sehari-hari. Jika perempuan nelayan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh keluarga, termasuk pendidikan anak-anak dan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, memastikan kesejahteraan mereka bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai.

Selain aspek ekonomi, kesejahteraan nelayan perempuan pesisir juga berkaitan dengan pengakuan sosial atas peran mereka. Selama ini, banyak perempuan yang bekerja di sektor perikanan masih dipandang sebagai pekerja informal atau bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja utama. Akibatnya, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum, akses terhadap jaminan sosial, serta kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan di komunitas nelayan. Dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, perempuan nelayan dapat memperoleh hak-hak yang lebih adil dan mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Metode**

Proses pengabdian ini dijalankan dengan menggunakan metode serta tahapan yang tersusun secara sistematis. Dalam sebuah pelatihan, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, seperti metode demonstrasi dan contoh, metode simulasi, *metode on the job training*, *metode vestibule* atau balai, metode *apprenticeship*, serta metode ruang kelas(7). Namun, metode-metode tersebut dianggap kurang sesuai untuk diterapkan dalam pengabdian ini. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ***Participatory Learning and Action (PLA)***. Menurut Narayanasamy (2009) dijelaskan bahwa PLA adalah proses di mana

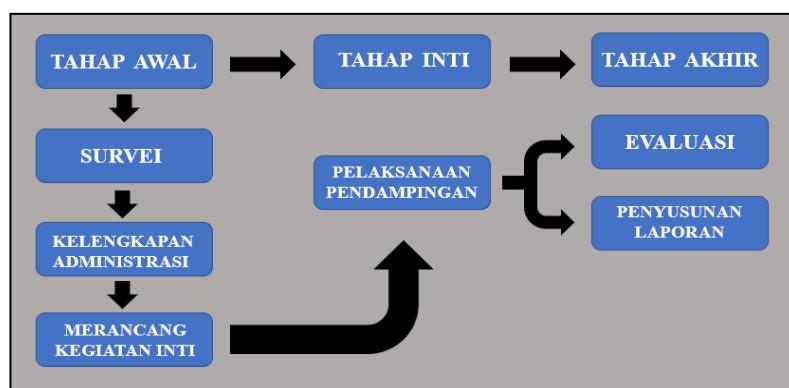
masyarakat secara aktif terlibat dalam pembelajaran dengan cara eksplorasi, diskusi, serta tindakan nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan(8).

Metode ini merupakan bentuk baru dari pendekatan pemberdayaan masyarakat yang lebih dikenal sebagai ***learning by doing*** atau belajar sambil praktik(9). Menurut John Dewey ***learning by doing*** adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta memperoleh pemahaman yang lebih dalam dengan melalui pengalaman langsung daripada sekadar menerima teori(10). Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman yang nyata dan relevan dengan kehidupan peserta agar mereka dapat berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam lingkup masyarakat.

PLA diterapkan dalam bentuk proses pembelajaran kelompok yang dilakukan secara interaktif dalam suatu rangkaian kerja(11,12). Konsep metode PLA berfokus pada diskusi, ceramah, serta curah pendapat yang berlangsung secara interaktif dalam kelompok, kemudian diikuti dengan aksi atau kegiatan konkret yang berkaitan dengan materi pemberdayaan(13).

Metode yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan perempuan pada organisasi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) di Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pendampingan berbasis penguatan modal sosial. Adapun tahapan uraian metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pengabdian ini adalah :

**Gambar 5. Bagan tahapan pengabdian**



Gambar diatas dijelaskan sebagai berikut :

#### **Tahap Awal**

Kegiatan ini meliputi

#### **Survey**

Kegiatan paling awal adalah melakukan survei dengan mengunjungi pihak mitra ke lokasi. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan utama mitra agar mengetahui solusi yang tepat sasaran.

### **Kelengkapan Administrasi**

Menyiapkan persyaratan-persyaratan legal formal yang harus dicantumkan di dalam proposal agar sesuai pedoman pengabdian tahun 2025

### **Merancang Kegiatan Inti**

Menyusun dan memformulasikan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada mitra.

### **Tahap Inti**

Proses yang dilaksanakan pada tahap ini adalah kegiatan inti pengabdian yaitu berupa pendampingan. Pelatihan setidaknya akan dilakukan selama tiga hari dengan komponen berupa 1 hari untuk muatan teori dan 2 hari untuk praktik pendampingan berbasis modal sosial. Pada tahap ini akan dilakukan mekanisme *pre-test* dan *post-test* untuk melihat signifikansi kegiatan bagi tingkat pemahaman peserta.

### **Tahap Akhir**

Terdapat dua aktivitas dalam tahap ini yaitu:

### **Evaluasi**

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan untuk kemudian mencari solusi alternatif atas permasalahan, kendala dan hambatan yang masih ada di lapangan.

### **Penyusunan Laporan Pengabdian**

Tahap akhir dari program ini adalah melakukan pelaporan dan merampungkan luaran-luaran yang diharapkan dari kegiatan ini.

**Partisipasi Mitra dalam Kegiatan** bisa dijelaskan melalui catatan berikut:

Semua prosedur kerja dan metode yang ada di atas akan dilaksanakan untuk mendukung organisasi KPPI Medan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapai. Dalam kegiatan ini tim pelaksana pengabdian akan menyiapkan seluruh keperluan terkait teknis pelaksanaan pendampingan sementara mitra akan menyiapkan tempat pelatihan dan peserta pelatihan. Tim Pelaksana disertai dengan mitra akan bekerjasama dalam melakukan pendampingan yang berkelanjutan dan bersedia sewaktu-waktu memberi masukan yang dibutuhkan bila ada kendala yang ditemukan di kemudian hari.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pendampingan Berbasis Modal Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Pada Organisasi Kppi (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) Di Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2025, di sekretariat Organisasi KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) Kecamatan Medan Belawan Jl. Bliton. Jumlah peserta yang berhadir pada acara tersebut adalah sebanyak 31 orang yang semuanya terdiri perempuan mengingat organisasi ini menghimpun para perempuan nelayan didalamnya dan juga dengan rentang usia kurang lebih 25 – 45 tahun. Para peserta berasal dari berbagai lingkungan yang ada di Kelurahan Bagan Deli.

Kemudian penyampaian materi oleh dosen yaitu Bapak Prof. Dr. Drs. Bengkel M.Si dengan judul presentasi “*Pendampingan Berbasis Modal Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Pada Organisasi Kppi (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) Di Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*”. Pada pukul 11.00 – 12.00 WIB masuk ke sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Pada sesi ini terdapat sebanyak 3 pertanyaan yang masuk dari para peserta seperti: *Bagaimana bentuk konkret yang harus dilakukan sebagai seorang perempuan nelayan dan juga sekaligus ibu rumah tangga dalam memenuhi kesejahteraan keluarga kami apakah perempuan selalu memiliki posisi tawar yg sama dalam menyuarakan ketidak adlian dalam lingkup sosial ?; apakah saat ini modal sosial berpengaruh besar terhadap proses peningkatan kesejahteraan nelayan perempuan ?.*



**Gambar 1. Momen ketika Prof. Dr. Bengkel Ginting mempresentasikan materai pengabdian masyarakat**



**Gambar 2. Momen ketika dilakukannya sesi tanya jawab kepada peserta pengabdian masyarakat**



**Gambar 3. Momen foto bersama peserta pengabdian masyarakat**

## Hasil

Untuk mengetahui dampak dan signifikansi dari kegiatan tersebut bagi tingkat pemahaman peserta, maka sebelum masuk ke acara pemaparan materi, para peserta diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner dengan alokasi waktu sebanyak 10 menit dengan jumlah soal sebanyak 20 soal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal para peserta tentang tema sosialisasi yang disampaikan. Data ini juga digunakan sebagai pegangan untuk melihat seberapa signifikan peningkatan pemahaman mereka pra dan pasca sosialisasi. *Post-test* dilakukan di akhir acara sebelum penutupan dengan soal dan alokasi waktu yang sama. Hasil pre dan *pos test* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 1 Data Kuesioner Pre dan Post-Test**

No. Peserta	Pre-test	Post-test
-------------	----------	-----------

1	50	80
2	50	90
3	30	70
4	50	80
5	40	90
6	60	100
7	50	90
8	40	90
9	40	100
10	60	100
11	60	100
12	50	100
13	60	90
14	50	90
15	40	80
16	60	100
17	50	90
18	55	90
19	45	80
20	65	100
21	60	95
22	60	90
23	40	90
24	35	85
25	50	100
26	40	90
27	40	80
28	50	95
29	60	90
30	40	80
31	50	90
<b>Total Score</b>	<b>1530</b>	<b>2795</b>
<b>Average</b>	<b>50</b>	<b>90.8</b>
<b>Max</b>	<b>65</b>	<b>100</b>

Dari hasil pre dan post-test di atas terlihat bahwa ada peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada masing-masing peserta. Saat *pre-test*, nilai total dari semua peserta hanya sebanyak 1.530 skor dan hasil post-test setelah sosialisasi menjadi sebanyak 2.795 skor. Terdapat peningkatan sebanyak 1.265 skor dari sebelum dan

setelah sosialisasi dilakukan. Rata-rata nilai peserta sebelum sosialisasi hanya sebanyak 50 dan setelah sosialisasi meningkat menjadi 90.8. Kemudian nilai paling tinggi (maksimum) peserta hanya berkisar pada angka 65 dan setelah sosialisasi bertambah menjadi 100. Dari data kuesioner *pre* dan *post-test* ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta pendampingan berbasis modal sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini telah berdampak secara positif bagi peserta.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan berbasis modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pada organisasi kppi (kesatuan perempuan pesisir indonesia) di bagan deli kecamatan medan belawan berlangsung secara baik. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi nelayan perempuan pada daerah tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sikap antusias dari pihak mitra dan peserta sosialisasi. Kemudian, kegiatan ini juga terbukti telah meningkatkan pemahaman para peserta. Berdasarkan data yang dimuat diatas, hasil pre-test dengan post-test menunjukkan adanya trend peningkatan pemahaman yang sangat signifikan di masing-masing peserta. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berjalan baik dan sesuai dengan harapan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional [Internet]. 2015 [cited 2025 Mar 19]. INDONESIA MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN YANG TERBESAR DI DUNIA. Available from: <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-merupakan-negara-kepulauan-yang-terbesar-di-dunia-3441>
- Nontji A. Laut Nusantara. edisi 1. Jakarta: Djambatan; 2002.
- Inilah.com [Internet]. 2024 [cited 2025 Mar 19]. DATA: 10 Provinsi dengan Jumlah Nelayan Terbanyak di Indonesia. Available from: <https://www.inilah.com/provinsi-dengan-jumlah-nelayan-terbanyak-di-indonesia>
- knti.or.id. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). 2025 [cited 2025 Mar 19]. SEJARAH. Available from: <https://knti.or.id/sejarah/>
- Lin N. Social capital: a theory of social structure and action. Repr. Cambridge: Cambridge Univ. Pr; 2007. 278 p. (Structural analysis in the social sciences).

- Coleman JS. Dasar - Dasar Teori Sosial (Edisi Revisi). Nusamedia; 2017.
- Dessler G. Human resource management. Sixteenth Edition. New York: Pearson; 2020. 684 p.
- Narayanasamy N, editor. Participatory rural appraisal: principles, methods and application. Los Angeles: SAGE Publications; 2009. 363 p.
- Mardikanto T. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Cetakan kesatu. Bandung: Alfabeta; 2012. 342 p.
- Surahman YT, Fauziati E. Maksimalisasi Kualitas Belajar Peserta Didik Menggunakan Metode Learning By Doing Pragmatisme By John Dewey. jurnalpendidikandasar. 2021 Jul 21;3(2):137–44.
- Moeljono M, Kusumo WK. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). SLSI [Internet]. 2019 Oct 2 [cited 2025 Mar 21];17(3). Available from: <https://journals.usm.ac.id/index.php/solusi/article/view/1629>
- Silmi AF. PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) DI DESA TERPENCIL: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. JPM. 2017 Aug 10;1(1):97.
- Theresia A. Pembangunan berbasis masyarakat acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat. Alfabeta; 2014.
- Tsaniyah, N., & Juliana, K. A. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks Di Era Disrupsi. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi vol.4 no.1, 121-140.